

KLIPING MEDIA 2019

KABUPATEN SELUMA KAMIS, 31 OKTOBER 2019

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA		
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS		
	RADAR BENGKULU			

KA	TEGO	ORI BI	ERITA	UNT	UK	BPK

POSITIF

NETRAL

BAHAN PEMERIKSAAN

PERHATIAN KHUSUS

Polres Usut Proyek TPI

Temuan BPK Tahun 2017

SELUMA – Satu lagi kasus dugaan korupsi di Kabupaten Seluma dalam bidikan penegak hukum. Yakni pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Seluma yang merupakan proyek di Dinas Perikanan Seluma tahun 2017.

Sebagaimana diketahui hasil audit investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap realisasi anggaran tahun 2017 ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara. Setidaknya di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Seluma. Diantaranya Dinas Perikanan, RSUD Tais, Dinas Kesehatan, Dispendik dan Disperindagkop UKM. Sejauh ini lima OPD tersebut telah melakukan penggem-

balian kerugian negara sebagaimana temuan BPK.

Tampaknya pengembalian tersebut tak menghentikan penyidik Polres Seluma mendalami temuan tersebut akan kemungkinan adanya tindak korupsi. Bukan hanya sekadar kesalahan administrasi. Hanya saja untuk tahap pertama ini, Polres Seluma fokus dipengusutan proyek TPI Pasar Seluma dimana temuan BPK ada kerugian negara mencapai Rp 360,3 juta.

"Ya saat ini kita lagi mendalami kasus TPI Pasar Seluma yang memang dipermasalahkan masyarakat di sana. Pengusutan ini tindaklanjut dari temuan BPK. Betul pihak-pihak terkait telah melakukan pengembalian kerugian negara, tapi ini tak menghentikan penyelidikan.



I NYOMAN MERTADANA

Apalagi pengembalian dilakukan saat temuan itu sudah mulai kita usut," jelas Kapolres Seluma, AKBP. I Nyoman Merthadana, S.Ik melalui Kasat Reskrim, AKP. Rizka Fadhilah, SH, S.Ik. Disampaikan Rizka pihaknya menghargai sikap kooperatif tak hanya Dinas Perikanan tetapi juga empat OPD. Namun pengembalian kerugian negara tak menghentikan penyelidikan, apalagi bila dikaitkan dengan azas manfaat terhadap item pekerjaan yang bermasalah itu (TPI Pasar Seluma, red). Proyek fisik yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan itu tidak berfungsi secara maksimal.

"Kami yakin jika dilakukan pengecekan fisik dengan melibatkan tim ahli, pasti akan ada temuan lainnya. Apakah pengurangan volume ataupun kualitas bangunan. Jadi kita akan pastikan ini. Kalau ternyata ada indikasi tersebut (pengurangan volume pekerjaan), sudah pasti kita tingkatkan ke penyidikan," tegas Rizka. (aba)